

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Definisi Pengetahuan, Mahasiswa, dan Politik**

Pengetahuan adalah gabungan antara pemahaman teoritis dan praktis yang dimiliki oleh seseorang. Kehadiran pengetahuan dalam individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kecerdasan mereka. Pengetahuan dapat diwakili dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk buku, teknologi, praktik, dan tradisi. Namun, pengetahuan akan mengalami transformasi yang lebih bermanfaat ketika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan memiliki peran krusial dalam kehidupan dan perkembangan individu, masyarakat, maupun organisasi.

Pengetahuan diperoleh melalui proses pengenalan dan ini terjadi setelah individu melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Pengamatan ini melibatkan penggunaan panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia didapatkan melalui pengamatan dengan mata dan pendengaran. Menurut Notoatmodjo dalam (Akmal, 2018). Pengetahuan atau pemahaman kognitif memainkan peran dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Tindakan tersebut didasarkan pada pengalaman dan penelitian yang mendasarinya, yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki.

Pengetahuan adalah hasil dari perasaan yang ada dalam diri seseorang terhadap rasa ingin tahu, yang diperoleh melalui pengalaman sensoris terutama melalui penglihatan dan pendengaran terhadap objek tertentu atau hal-hal yang ingin diketahui. Pengetahuan juga merupakan area yang signifikan dalam membentuk perilaku yang terbuka atau perilaku yang mencerminkan keterbukaan pikiran. Pengetahuan, yang juga dikenal sebagai knowledge, dipengaruhi oleh pendidikan formal dan memiliki keterkaitan yang erat dengannya. Diharapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, pengetahuannya akan semakin luas. Namun, tidak mutlak bahwa seseorang dengan pendidikan rendah akan memiliki pengetahuan yang rendah pula. Pendidikan politik dalam konteks

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan nasib bangsa dan bernegara kedepannya. Oleh karena itu, diperlukan cara agar pendidikan politik tepat sasaran bagi pendewasaan warga negara. Menurut A. Kosasih Djahiri (1995, hlm.18)

“Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa dan negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada”.

Dengan demikian, adanya pendidikan politik sangat diperlukan untuk membangun pemahaman tentang politik serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kesadaran untuk berpartisipasi politik secara aktif bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan politik serta sosialisasi kepada masyarakat, dan juga agar diberikan wadah untuk mengemukakan pemikiran berupa ide-ide untuk menjadi masukan kepada pemerintah (Ferri, 2013, hlm.16).

Pelaksanaan pendidikan politik harus dilaksanakan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan nilai dan keberpihakan dan mewujudkan kecakapan sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, materi-materi pendidikan politik yang harus dilaksanakannya mencakup posisi individu dalam kehidupan bernegara, posisi konstitusi dalam bernegara, posisi negara dalam menjalin relasi dengan warganya. Isu-isu kontroversial dalam pendidikan politik dapat mendukung perkembangan pemikiran dalam sebuah diskusi agar siswa dapat mengembangkan minat dalam politik dan membuat penilaian.

Dalam merangkai kepemimpinan yang Islami, diperlukan sosok pemimpin yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pemimpin yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an akan mampu membawa kemajuan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi. ”Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ”

dapat dilihat dalam pengetahuan politik Quran tentang-Al Adapun ayat yaitu 58surah Annisa ayat

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”

Ayat ini menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan pemerintah.

Hadis tentang kepemimpinan:

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam kepemimpinan, yang relevan dalam konteks politik.

Adapun ayat Al-Quran tentang kecerdasan dalam menentukan pilihan dapat dilihat dalam surah Al-Hujurat yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa".

Hadis tentang kecerdasan dalam menentukan pilihan adalah "Apabila seseorang di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan, maka pilihlah yang lebih baik dari keduanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengajarkan prinsip kebijaksanaan dalam menentukan pilihan, yang bisa diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pemilihan pemimpin.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Menurut (Effendi, 2009) Pengetahuan tercakup dalam 6 tingkatan yaitu sebagai berikut:

a) Tahu (know)

Tahu adalah proses mengingat kembali (recall) informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling dasar, dan untuk mengukurnya dapat menggunakan kata kerja seperti menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sejenisnya.

b) Memahami (comprehension)

Memahami adalah kemampuan untuk memberikan penjelasan yang akurat dan benar tentang suatu objek yang telah diketahui sebelumnya. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap materi yang telah dipelajari, dengan kemampuan untuk memberikan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sejenisnya terhadap objek yang menjadi fokus pemahaman tersebut.

c) Aplikasi (application)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau kondisi yang konkret.

d) Analisis (Analysis)

Analisis adalah keterampilan untuk memecah suatu objek menjadi elemen-elemen yang terdapat dalam struktur organisasinya, dan menjelaskan hubungan dan keterkaitan di antara elemen-elemen tersebut. Kemampuan ini dapat diukur dengan menggunakan kata kerja seperti menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sejenisnya.

e) Sintesis (syntesis)

Sintesis adalah keterampilan untuk menggabungkan atau menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan yang baru, atau menciptakan sesuatu yang baru dari formulasi yang telah ada sebelumnya.

f) Evaluasi ( evaluation)

Evaluasi adalah kemampuan untuk memberikan alasan atau penilaian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada sebelumnya.

### 3. Definisi Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi, seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 tahun sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah penetapan pendirian hidup ( Yusuf,2012 ) . Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan bahwa mahasiswa adalah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi ,institut dan universitas. Sedangkan dalam penelitian ini,subjek yang digunakan adalah mahasiswa yang berusia 22-23 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif.

a. Ciri – Ciri Mahasiswa

Menurut Kartono ( dalam Ulfah 2010) mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain :

- a. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar diperguruan tinggi , sehinggadapat digolongkan sebagaikaum intelegasi
- b. Karena kesempatan yang ada, mahasiswa diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
- c. Diharapkan dapat menjadi daya penggerakan yang dinamis bagi proses modernisasi

- d. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

b. Karakteristik Mahasiswa

Seperti halnya transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama yang melibatkan perubahan dan kemungkinan stres, begitu pula masa transisi dari sekolah menengah atas menuju universitas. Dalam banyak hal, terdapat perubahan yang sama dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi kelompok dengan kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaiannya. ( Santrock 2002 )

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan wawasan dan cara berfikir baru seperti ; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam soal pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada umumnya dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru.

#### 4. Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari kata *polis* menurut bahasa Yunani yang artinya negara kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, *politeia* artinya segala hal mengenai negara. *Polites* artinya warga negara. *Politikus* artinya ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan. *Politicia* artinya pemerintahan negara.

Istilah politik sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan dalam sistem politik. Untuk memahami arti politik, sebenarnya sangat tergantung dari sudut mana ia melihatnya. Pada umumnya politik dikaitkan dengan negara, konflik dan konsensus. Politik juga biasa dipandang dari sudut kebijakan, kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Pengertian Politik menurut beberapa ahli antara lain ;

- a. Menurut Rod Hauge et.al, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan keputusan yang

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

- b. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama

Pengertian Ilmu Politik menurut beberapa ahli diantaranya;

- a. Menurut J. Barents, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.
- b. Menurut George B de Huszar dan Thomas H. Stevanus, ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama – tama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara dan antara negara dan negara

Dari definisi politik dan ilmu politik menurut beberapa para ahli diatas dapat diidentifikasi pembatasan di antara keduanya yaitu antara politik dan ilmu politik bahwa adanya pembatasan pada dimensi praktis, arts dan policy. Hanya saja pendefinisian politik lebih terlihat dalam dimensi praktis yang berupa tindakan, sikap atau perilaku yang muncul dilatarbelakangi oleh adanya dimensi art (ilmu, seni), policy (kebijakan), sementara pendefinisian ilmu politik lebih didekatkan pada dimensi waktu kajian ilmu politik. .

- a. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karna baru lahir pada abad ke 19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.

Apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan



politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Politik seperti di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Selain itu, ada juga fakultas ilmu sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan jurusan tersendiri. Akan tetapi, karena pendidikan Tinggi Ilmu Hukum sangat maju tidaklah mengherankan apabila pada awal perkembangan ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Namun demikian, dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal dan sudah diterima baik oleh masyarakat.

Sementara itu perkembangan ilmu-ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga dewasa ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990an. Ini dicirikan dengan masih berlakunya pendekatan tradisional tapi ditambah dengan pendekatan-pendekatan lain yang tengah berkembang di negara-negara barat.

Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah perang dunia ke-II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO pada Tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik dikira-kira 30 negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University AS, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *contemporary Political Science*.

Pada masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-



cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Berkat berbagai usaha tersebut ilmu politik. Berkat berbagai usaha tersebut ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpendang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik.

b. Objek Studi Ilmu Politik

Objek suatu ilmu dapat dibedakan menjadi objek material dan objek material dan objek formal. Objek material merupakan bahan yang menjadi pembahasan atau sasaran panca indra. Sedangkan objek formal yang menjadi pusat perhatian atau sasaran pengetahuan. Objek material suatu ilmu dapat saja lebih dari satu dan juga merupakan objek material ilmu yang lain. Tetapi objek formal suatu ilmu merupakan ciri khas yang membedakannya dengan ilmu yang lain.

Objek material ilmu politik relatif banyak yaitu mencakup negara, pemerintah, kekuasaan, fakta, politik, distribusi dan alokasi nilai, kebijakan umum, organisasi masyarakat, kegiatan politik dan pengambilan keputusan. Bahan yang luas dari ilmu politik tidak lepas dari sifat politik sebagai suatu yang serba hadir atau berada dimana-mana. Namun bukan berarti menjadikan ilmu politik tidak memiliki batas-batas yang jelas dengan ilmu yang lain. Kejelasan batas itu tetap terlihat yaitu pada objek formal ilmu politik yaitu berupa kekuasaan yang menyangkut kegiatan yang berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Terutama kekuasaan dalam membuat, melaksanakan dan menegakkan kebijakan publik.

Menurut Miriam Budiardjo bahwa ontologi ilmu politik ada lima, yaitu:

	<b>Definisi</b>	<b>Tokoh</b>
<b>Negara</b>	Organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya	<b>Roger F. Soltau</b> : ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga, hubungan negara dengan warganya serta hubungan antar negara.
<b>Kekuasaan</b>	Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku	<b>Horald D. Laswell dan A. Kaplan</b> : ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan
<b>Pengambilan Keputusan</b>	Hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai	<b>Joyc Mitchel</b> : politik ialah pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat seluruhnya
<b>Kebijakan Umum</b>	Kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu	<b>David Easton</b> ilmu politik : studi mengenai terbentuknya kebijakan umum
<b>Pembagian</b>	Pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai dapat bersifat abstrak dan dapat bersifat konkret	<b>Harold D. Lasell</b> : politik ialah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana

c. Konsep – konsep Ilmu Politik

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa ilmu politik mengandung 5 konsep dasar yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Selain kelima konsep dasar tersebut berikut ini beberapa contoh konsep ilmu politik:

1. Masyarakat

Robert M Mclver menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan hubungan yang diatata

2. Negara

Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politi. Negara mempunyai dua tugas yaitu :

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosiasi yakni dengan bertentangan satu sama lain, agar tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
- b. Organizer dan mengintegrasika kegiatan manusia dan golongan -golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan diselesaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Negara terdiri dari unsur-unsur yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengajar beberapa tujuan terakhir ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

3. Kekuasaan

Konsep politik dianggap identik dengan kekuasaan. Menurut Max Weber kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan ini. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi dengan cara yang paling ampuh adalah dengan kekerasan fisik, namun ada pula upaya yang lebih lunak melalui persuasi dengan meyakinkan,berargumentasi atau menunjuk pada pendapat para ahli agar tidak menonjolkan kekuasaanya. Sumber kekuasaan adalah kekayaan,kepercayaan atau agama.

#### 4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan segala termasuk paksaan konsep kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua yakni :

- a. Dilihat dari hukum tata negara, kedaulatan mengacu pada kekuasaan pemerintah tertinggi dan mutlak
- b. Dilihat dari hukum internasional, mengacu pada kemerdekaan negara terhadap negara lain

#### 5. Kontrol sosial

Politik mengandung konsep kontrol sosial yakni kepada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan diluar pemerintahan untuk memelihara menurut hukum dan aturan itu yang muncul didalam tiap-tiap masyarakat dan institusi. Kontrak sosial merupakan doktrin bahwa pemerintahan didirikan untuk dan oleh rakyat melalui semua negara yang menyatakan dirinya demokratis.

#### 6. Pemerintah

Proses pemerintah merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang Pemerintah juga dapat diartikan orang-orang yang memiliki kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga dalam pemerintahan. Pemerintahan memiliki tiga peran dinas yang terpisah yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

#### 7. Legitimasi

Legitimasi atau kopstand adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada diri seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.

#### 8. Oposisi

Partai atau kelompok yang berada diluar peran pemerintahan yang berfungsi untuk mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik dalam kekuasaan. Oposisi tidak hanya mengingatkan kemungkinan kesalahan namun juga menunjukkan apa yang harus dilakukan.

## 9. Sistem Politik

Semua proses institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan politik itulah yang disebut sistem politik. Konsep sistem politik dalam penerapan pada situasi konkret seperti negara mencoba berdasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam konteks tinglah laku dimasyarakat. Sistem politik akan mencakup fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan, kewenangan baik secara sah maupun tidak. Di dalam sistem politik biasanya terdapat empat variabel yakni kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik.

## 10. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat tutur serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun, ada yang menyatakan suatu sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala atas dasar prinsip, kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

## 11. Kewenangan

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

## 12. Pengaruh

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukan bertindak walaupun berpengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologi dan menyentuh hati dan karena itu sering berhasil.

### 13. Ajakan

Kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan.

### 14. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu kebijakan kegiatan politik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di depan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum kini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik.

### 15. Partai Politik

Sekelompok manusia yang terorganisasi yang anggota-anggotanya orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan ini adalah memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

### 16. Desentralisasi

Pemindahan hak-hak pengaturan dan perintah dari badan-badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah. Misalnya desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa otonomi daerah.

### 17. Persamaan

Setiap orang dikatakan punya kedudukan yang setara sebagai warga negara memiliki prinsip persamaan.

### 18. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Hak-hak tersebut bukan pemberian atau anugrah negara yang dapat dicabut melalui peraturan hukum melalui negara.

### 19. Demonstrasi

Tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama menunjukkan dukungan maupun protes kolektif merupakan ketidakpuasan ataupun ketidaksetujuan

### 20. Pemungutan Suara

Pemungutan suara merujuk kepada suatu instrumen untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atas calon dalam pemilihan.

Pada dasarnya, politik adalah fenomena yang terkait dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang hidup dalam dinamika dan perkembangan yang terus berlangsung. Oleh karena itu, politik selalu menjadi manifestasi dari proses perkembangan manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya.

Karena manusia merupakan inti utama dalam politik, maka dalam pengamatan atau analisis politik, faktor manusia tidak dapat diabaikan begitu saja. (Djawamaku, 1984) Pada dasarnya, "pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisis politik". Oleh karena itu, kata "politik" yang berasal dari kata "politic" mengacu pada sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, asal kata tersebut diartikan sebagai "bertindak atau menilai dengan bijaksana, terencana dengan baik, dan berhati-hati". (Hornby, 1974) Sejak lama, kata tersebut telah dikenal dalam bahasa Latin sebagai "politicus" yang berasal dari bahasa Yunani (Greek) "politicus" yang memiliki arti "berhubungan dengan warga negara". Kedua kata ini berasal dari kata "polis" yang berarti "kota".

Istilah politik berkembang sehingga secara serampangan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan memiliki tiga arti yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh WJS Poerwardaminta. Pertama, politik merujuk pada semua urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, juga termasuk strategi dan kecerdikan. Kedua, politik digunakan untuk merujuk pada tipu muslihat atau tindakan licik. Ketiga, politik juga digunakan sebagai nama untuk sebuah disiplin ilmu yang dikenal sebagai ilmu politik.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, istilah "politik" pertama kali dikenal pada masa Plato melalui bukunya yang dikenal sebagai "Politeia" atau juga dikenal dengan sebutan "Republik". (Deliar, 2001) Selanjutnya, istilah "politik" berkembang melalui karya penting Aristoteles yang dikenal sebagai "Politica". Karya-karya Plato dan Aristoteles ini dianggap sebagai titik awal yang penting dalam pemahaman konseptual politik. Sebuah pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, dimana hal itu didapat melalui bahwa "politik" adalah istilah dipergunakan sebagai konsep aturan warga negara, sebab didalam kedua



karya itu membahas persoalan-soalan yang berhubungan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan supaya bisa mewujudkan sebuah kelompok masyarakat berpolitik atau suatu organisasi negara yang baik.

Sebagai akibatnya, konsep politik mencakup berbagai unsur seperti lembaga-lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, Kelompok warga dapat dianggap sebagai entitas yang memiliki kepentingan, kebijaksanaan, dan hak-hak yang berperan dalam mengatur masyarakat, serta memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepenuhnya memiliki kesepakatan tentang batasan atau definisi yang tepat untuk "politik," unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas dapat ditemukan sebagian atau tersirat dalam definisi yang mereka ajukan.

Dari berbagai pengertian yang telah ada, ditemukan 2 kecenderungan tentang definisi politik diantaranya;

- 1) Pandangan yang dihubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat serta daerah;
- 2) Pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan dengan konflik.

### **5. Fungsi- fungsi dan struktur politik**

Dalam proses adaptasi dan perubahan lingkungan untuk kelangsungan hidup, setiap sistem politik melaksanakan fungsi-fungsi dasar tertentu. Fungsi di sini mengacu pada berbagai makna dan kegiatan yang alamiah untuk mencapai tujuan tertentu, mirip dengan contoh "fungsi jantung" yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu pula, dalam konteks "fungsi pemerintah" mengandung arti pencapaian tujuan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam arti luas fungsi menunjukkan akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. (K, 1967) Dinyatakan bahwa fungsi mengacu pada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang menjaga kelangsungan hidup suatu sistem, sementara disfungsi menunjukkan bahwa sistem tersebut rusak atau terganggu. Dalam konteks kegiatan politik yang telah dijelaskan sebelumnya, Gabriel A. Almond membagi kegiatan politik menjadi dua kategori: fungsi masukan (input function) dan fungsi keluaran (output function). Fungsi masukan (input function)

merupakan bagian penting dalam menentukan bagaimana sistem politik beroperasi dan diperlukan untuk proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam sistem politik. Fungsi-fungsi politik dimaksud adalah:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah proses sosial yang memfasilitasi seseorang untuk menjadi anggota dalam kelompoknya. Dalam proses ini, individu belajar tentang kebudayaan kelompoknya dan peran yang harus dijalankan dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi politik adalah proses sosialisasi di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan politik kelompoknya, dan mereka bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Proses sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, seperti lingkungan pergaulan, pekerjaan, media massa, keluarga, sekolah, dan institusi resmi. Melalui sosialisasi ini, kebudayaan politik berkembang dan terjaga hingga generasi berikutnya.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik mengacu pada proses pemilihan warga negara untuk menempati posisi politik dan administrasi. Gabriel A. Almond menyatakan bahwa setiap sistem politik memiliki metode uniknya sendiri dalam merekrut anggota masyarakatnya untuk mengisi posisi politik dan administratif.

c. Artikulasi Kepentingan

Fungsi ini merupakan suatu proses ketentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dengan melalui kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk bersama dengan orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama, kadang-kadang rakyat secara langsung menyebutkan keinginannya kepada pejabat pemerintahan.

d. Agresi Kepentingan

Fungsi inisiasi adalah proses perumusan alternatif dengan jelas melalui penggabungan dan penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut politik kebijaksanaan tertentu. Agresi kepentingan dapat dijalankan oleh seluruh subsistem dari sistem

politik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi, partai politik, dan kelompok kepentingan.

e. **Komunikasi Politik**

Fungsi ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Dalam konteks sosialisasi politik, pihak lain menggunakan komunikasi untuk mengambil bagian dalam proses tersebut. Fungsi-fungsi keluaran (output functions) mencakup pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan pengawasan terhadap penerapan aturan. Ketiga fungsi ini, menurut Gabriel A. Almond, termasuk dalam fungsi-fungsi pemerintahan. Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut tidak dilakukan karena adanya ketidakpastian dalam struktur formal pemerintahan di banyak negara non-Barat, serta terdapat penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dari konstitusi. (Abdulkadir B. Nambo, 2005).

## **6. Pengertian Pemilihan Umum Pemilu**

Menurut definisi yang terdapat dalam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses di mana suara dipilih biasanya dilakukan secara serentak oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah negara. Dalam teori transendental, Ibnu TikaHyono memberikan penjelasan mengenai pemilu dari sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Dia menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah, serta sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pemilihan Umum adalah sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara untuk memilih pemimpin yang akan mewakili seluruh rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan bagian dari upaya dalam menjalankan demokrasi. Pemilihan Umum dapat dipahami sebagai institusi dan praktik politik yang menghasilkan terbentuknya pemerintahan yang representatif. Pemilihan Umum dianggap sebagai arena "pasar politik" di mana individu dan masyarakat dapat berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan peserta pemilu.

Para pakar memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai arti pemilihan umum (pemilu) dalam konteks operasionalnya. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Umaruddin Masdar mengaitkan pemilihan umum dengan sudut pandang teknis implementasinya. Menurutnya, pemilihan umum adalah proses di mana seluruh masyarakat diberikan hak suara melalui pencoblosan kode bergambar untuk memilih wakil-wakil yang akan menjadi pemimpin bagi masyarakat.

Menurut Andrew Reynolds, pemilihan umum dapat dianggap sebagai suatu mekanisme di mana surat suara yang digunakan dalam pemilihan diibaratkan sebagai bangku-bangku yang diperoleh oleh partai-partai politik dari kandidat mereka di parlemen. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih perwakilan dari masyarakat yang akan bertindak sebagai wakil rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kemajuan masyarakat dan negara. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Pratikno, yang menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode politik yang berfungsi untuk mengubah hasil suara rakyat menjadi pemimpin yang akan mewakili rakyat sebagai wakil mereka.

## **7. Sistem Pemilu**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sistem dapat diartikan sebagai unsur perangkat yang memiliki ikatan normatif sehingga membentuk suatu kesatuan. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), terdapat dua jenis sistem yang dapat diidentifikasi secara teoritis., yaitu seperti berikut:

1. Sistem Mekanis dalam pemilihan umum (pemilu) mencerminkan pendekatan yang bersifat mekanis, di mana pandangannya adalah masyarakat sebagai individu-individu yang seragam. Dalam sistem ini, setiap orang memiliki satu suara dalam pemilihan. Sistem Mekanis dapat diimplementasikan melalui dua metode yang berbedaseperti dibawah ini:

- a) Sistem Perwakilan Distrik

Berdasarkan sistem perwakilan distrik ini, wilayah negara dibagi menjadi distrik-distrik atau kawasan pemilihan dengan jumlah anggota perwakilan rakyat yang sama. Setiap wilayah pemilihan akan diwakili oleh satu orang yang

merupakan wakil konstituensi. Orang yang akan dipilih sebagai pemimpin dari suatu kawasan pemilihan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dengan mayoritas suara di daerah tersebut.

b) Sistem Perwakilan Berimbang

Sistem perwakilan berimbang, juga dikenal sebagai multi member constituency system atau sistem perwakilan proporsional, melibatkan pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Dalam sistem ini, setiap partai politik mendapatkan persentase kursi yang sebanding dengan jumlah suara yang mereka terima. Dalam praktiknya, pada surat suara terdapat nama-nama partai politik atau kandidat peserta pemilihan. Sistem perwakilan berimbang ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Sistem Pemilihan Transferabel Tunggal (Hare System) adalah sistem di mana pemilih diberi kesempatan untuk memilih opsi pertama, kedua, dan seterusnya berdasarkan wilayah yang ditentukan. Jumlah suara yang diperlukan oleh pemilih untuk mencapai ambang batas tertentu telah ditetapkan. Setelah jumlah kuota pertama terpenuhi, jika terdapat suara yang tersisa, suara tersebut akan dialihkan ke kandidat berikutnya.
  - b) Sistem Daftar (List System) merupakan sistem di mana setiap pemilih diminta untuk memilih dari daftar yang disediakan yang berisi nama-nama peserta pemilu yang akan menjadi wakil rakyat. Pemenang dalam sistem ini adalah peserta pemilihan umum yang memperoleh jumlah suara terbanyak..
2. Sistem Organik merupakan sistem yang menyatakan bahwa masyarakat, sebagai sejumlah individu atau orang-orang yang hidup bersama, membentuk sebuah kelompok dalam berbagai bentuk perkumpulan. Sistem ini juga melahirkan sistem parlemen dua kamar atau sistem perwakilan fungsional, juga dikenal sebagai parlemen bikameral. Contoh penerapan sistem ini dapat ditemukan di Amerika Serikat, di mana terdapat Kongres yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Dewan Perwakilan Daerah (Senate)(Anugrah, 2021)

## B. Penelitian Terdahulu

Pada tahap penelitian, penting untuk melibatkan penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam penelitian tetap berada dalam batasan masalah atau fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menjadi lebih terarah. Penelitian terdahulu ini juga menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti, yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian yang sedang dilakukan. Perbandingan, maupun sebagai dasar pemilihan topik dalam menyusun penelitian ini. Peneliti mengumpulkan hasil penelitian ini dari berbagai sumber dengan cara mencari beberapa jurnal maupun skripsi yang terkait sesuai dengan penelitian yang disusun.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Instansi	Metode Penelitian	Hasil
1	Andi Aco Agus, Sukri Badaruddin, Nirwan Fikri Muhkam, dan Aprillian Dwi Umalia dari Universitas Negeri Makassar melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan politik terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa pada Pemilihan Presiden 2019-2024.	Kuantitatif dengan Pendekatan Expost Fact	Terdapat adanya pengaruh positif antara pengetahuan politik dengan partisipasi politik, namun pengaruh positif yang diberikan oleh mahasiswa Ppkn Fis Negeri Makassar hanyalah sedikit pada pemilihan umum 2019-2024 tidak cukup besar hanya sebesar 23%.
2	Teuku Teguh Furqan Anugrah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Politik terkait pengetahuan politik.	Metode Pendekatan Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini pertama tingkat pengetahuan pemilu di yang dimiliki oleh para mahasiswa ilmu politik cukup sangat tinggi terdapat 87,66 %